

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

1. Pengertian dan Pengaturan Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini nasabah yang bersangkutan) cidera janji (wanprestasi). Istilah bank garansi berasal dari bahasa belanda yaitu ¹*bank garantie*. Pengertian bank garansi ini terdapat pada pasal 1 syarat

keputusan Direksi BI nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang Pemberian jaminan oleh bank dan jaminan oleh lembaga keuangan yang Non-bank menyatakan, “Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-²bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap terhadap pihak yang yang menerima jaminan apabila pihak penerima jaminan cidera janji”.

Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga, apabila yang menerima jaminan wanprestasi.

¹ Tejawati, D. N. (2012). Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan. *Perspektif*, 17(2), 108-117.

² Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group ha 87

Pengertian bank garansi menurut para ahli:

- 1) Huyaso dan achmad anwari mengartikan garansi bank adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Bank menjamin³ untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagai mana yang sudah di perjanjikan.
- 2) Muhammad Djumahan menyatakan bahwa “Bank Garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank, maksudnya adalah bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan dirinya kepada penerima jaminan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan adanya syarat tertentu, apabila dikemudian hari si tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.”⁸

Bank Garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur, hal ini dapat dijumpai dalam praktek pemborongan bagian

³ S. Gozali, Djoni, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika hal 134

dalam bentuk khusus yang disebut Tender Garansi (*tender bond*) atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk *performance bond* atau jaminan pelaksana pekerjaan.

Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penangungan borgtocht yang diatur dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerdata. Dan secara umum ketentuan mengenai bank garansi mengacu kepada SK direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 maret 1991 dan SE (surat edaran) No.23/7/UKU dan tanggal 18 maret 1991. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang di berikan undang-undang yaitu memilih salah satu Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUH Perdata. Dalam Pasal 1831 yang berbunyi “si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utang. Sedangkan pada Pasal 1832 menyatakan bahwa “Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda untuk melunasi utangnya..

2. Jenis-Jenis Bank Garansi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh bank. Jenis-jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain:

1) Garansi Bank Pita Cukai tembakau

Garansi yang di berikan kantor bea dan cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang di jamin adakah pabrik rokok.

2) Garansi Bank Penangguhan Bea Masuk

Garansi bank yang di berikan kepada kantor bea cukai sebagai⁴jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

3) Garansi Bank tender/Bid bond dalam negeri.

Garansi bank yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atas suatu proyek. Garansi bank jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang mengikuti penawaran atau⁵tender untuk mengerjakan suatu proyek yang akan di syaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dilakukan oleh bank. Terjadi cidera janji apabila pihak dijamin (nasabah) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek, padahal ini ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

4) Garansi bank pelaksanaan /*perfomance bond*

Garansi bank ini di terbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *perfomance* salah satu

⁴ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group hal 65

⁵ Daeng, H.R Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 98

pihak melakukan transaksi. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk⁶ kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan⁷ nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) . Besar nilai Jaminan Pelaksanaan berdasarkan pasal Pasal 33 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

1. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak ; atau
2. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

Besar nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi :

1. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

⁶ Suyatno Thomas, Djuhaepah T. Marala, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

⁷ Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

2. untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.

5) Garansi bank Untuk Uang Muka

Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon garansi bank dari pemilik proyek (*bouwheer*) baik dalam pembayaran uang muka maupun pembayaran keseluruhan proyek tersebut. Terjadi cidera janji apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikan, padahal ia telah menerima uang muka atas proyek tersebut.

6) Garansi Bank Pemeliharaan / *retention bank*.

Garansi bank yang diberikan pemilik proyek atau *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan aset atas proyek yang telah selesai oleh kontraktor.

3. Pihak-Pihak Di Dalam Bank Garansi

Bank Garansi jaminan adalah berupa perjanjian dari Bank kepada pemberi kerja atau pemilik proyek bahwa bank bertanggung jawab membayar kewajiban kepada kontraktor apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi. Perjanjian tersebut mempunyai jumlah, jangka waktu, dan keperluan lainnya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Bank

Indonesia No 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 jo SK Direksi Bank Indonesia NO 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 Tentang pemberian Bank Garansi oleh Bank termasuk penggantian dan perubahannya. Berdasarkan keterangan diatas maka di dalam pemberian Bank Garansi terdapat 3 (tiga) pihak yaitu :

1. Pihak Penjamin

Dalam hal ini pihak penjamin adalah bank, di mana bank lah yang akan menerbitkan sebuah jaminan (Bank Garansi) kepada nasabahnya yang memiliki sebuah kepentingan terhadap pihak lainnya. Fungsi bank disini adalah sebagai penanggung (borg), bank melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata,⁸ sehingga dengan demikian bank harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima bank garansi apabila nasabah wanprestasi.

2. Pihak Terjamin

Pihak terjamin adalah nasabah atau penyedia jasa yang mengajukan dan membuat sebuah permohonan jaminan kepada pihak bank, di mana nasabah tersebut akan meminta penerbitan sebuah jaminan bank untuk kepentingan perjanjiannya dengan pihak lain. Mengenai kesepakatan pemberian garansi bank oleh pihak bank kepada pihak terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana disebut pada Pasal 1824 BW, di dalam pasal tersebut diatur bahwa penanggungan

⁸ Laurensia, L. (2007). *Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

atau jaminan harus ditentukan secara tegas meskipun tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

3. Penerima Jaminan

Penerima jaminan adalah pihak ketiga atau pemilik proyek yang akan menerima jaminan yang diberikan oleh pihak bank karena adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan dengan pihak terjamin selaku nasabah bank tersebut. Pihak penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan atas wanprestasi yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di dalam perjanjian yang telah disepakatinya dengan pihak terjamin, di mana pihak ini akan berhak untuk mendapatkan sejumlah ganti rugi atas kejadian tersebut. Sebagaimana ketentuan yang mengatur isi Bank Garansi, antara lain diatur masalah *klausula* yaitu ketentuan yang mengatur bahwa dalam fungsinya sebagai penanggung (*borg*), bank melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata, sehingga dengan demikian bank harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima jaminan apabila nasabah *wanprestasi*. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penerbitan garansi bank tersebut. Untuk menerbitkan garansi bank, pihak terjamin (nasabah) harus memiliki

simpanan pada bank pemberi jaminan, biasanya simpanan ini bisa berupa deposito ataupun simpanan giro yang jumlahnya setidaknya harus sama dengan jumlah uang jaminan yang akan diterbitkan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tujuan, fungsi dan manfaat Bank Garansi

1. Tujuan Bank Garansi

Secara umum tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminakan adalah sebagai berikut.

- a. Bagi bank tujuannya adalah memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender.
- b. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
- c. Menumbuhkan rasa percaya antara pemberian jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.
- d. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama

bagi pemberian pekerjaan. Demikian pula, bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang benar dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan pihak nasabahnya tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.

- e. Bagi bank keuntungan yang diatas juga memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya dimata para nasabah.

2. Fungsi dan manfaat bank garansi

Fungsi bank garansi adalah sebagai pelaksanaan adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima jaminan, jika pihak yang dijamin cidera janji, dengan tujuan memberikan fasilitas guna menunjang usaha nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan uang secara kontan bank dapat memfasilitasi dengan kredit dari bank. Adapun fungsi bank garansi bagi kedua belah pihak baik nasabah atau debitur:

1. Bagi kreditur (penerima jaminan) bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
2. Bagi debitur (terjamin) bank garansi berfungsi sebagai saran mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur, bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada

waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya.

3. Bagi bank (penjamin) bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya dan memperoleh biaya- biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan lawan atau kontra garansi yang diberikan, maka kredibilitas bank juga meningkat .

Sedangkan manfaat bank garansi itu sendiri adalah sebagai suatu sarana untuk memperlancar lalu lintas pembagunan dan jasa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/5UKU tanggal 28 Februari 1991 yang berisi tentang pentingnya bank garansi untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa perdagangan surat-surat berharga. Selanjut bank garansi pada dasarnya memberikan suatu jaminan atas pemberian sejumlah uang yang melibatkan tiga pihak yaitu bank, pihak penerima jaminan dan pihak yang dijamin.

Bank garansi merupakan suatu perjanjian yang dikenal dengan ungkapan, bayar dahulu, bicara kemudian“(*eerst betalen dan praten*). Dengan menggunakan lembaga bank garansi diperlukan adanya uang jaminan (*waarborgsom*)’

C. Tinjauan Umum Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi

1. Syarat Pemberian Bank Garansi

Pemberian bank garansi oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan garansi *vide* Pasal 1824 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa penanggungan atau jaminan harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Sebagai pedoman dalam pemberian bank garansi Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan No. 11/110 Tahun 1979 dalam surat keputusan ini mencantumkan hal minimal yang harus dipenuhi dalam bank garansi:

1. Judul garansi bank atau bank garansi.
2. Nama dan alamat pemberi bank garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi.
4. Transaksi antar pihak yang terjamin dan penerima jaminan.
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
6. Tanggal mulai dan berlakunya bank garansi.
7. Penegasan batas waktu untuk klaim.
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita menjual benda- benda terjamin atau nasabah untuk melunasi utang sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata, atau persyaratan bahwa penjamin atau bank melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda terjamin atau nasabah lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata.

2. Barakhirnya Bank Garansi

Oleh karena perjanjian kredit / pemberian bank garansi tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, maka hapus / berakhirnya bank garansi dapat di perlakukan Pasal 1831 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapusnya / perikatan perjanjian-perjanjian tersebut dalam Pasal 1831, dalam praktek hapusnya / berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh Pembayaran Untuk kredit, pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun ⁹biaya –biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini ,baik karena jatuh tempo kredit atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeisbaarheid clause*). Sedangkan untuk pemberian bank garansi, pembayaran oleh bank kepada pihak ketiga

⁹ Fithriyah, A. (2018). *Implementasi produk jasa Bank Garansi iB dalam pola penjaminan kontra bank garansi di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

(*bouwweer*) sebagai akibat adanya klaim menjadikan perjanjian pemberian bank garansi berakhir dan berubah menjadi perjanjian kredit atau perjanjian pemberian bank garansi berakhir karena jangka waktu atau kerja pemegang bank garansi. Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai pengantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada pengantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran Pasal 1401 KUH Perdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan :

- a. Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berutang.
- b. Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak si berutang.

Yang dimaksud dengan novisi atau pembaharuan hutang disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai penggantian perjanjian kredit yang lama, dengan demikian perjanjian yang lama hapus dan berakhir, sedangkan yang berlaku pada bank dan debiturnya adalah perjanjian kredit yang baru. Oleh Pasal 1413 KUH Perdata ada tiga jalan untuk bisa dilakukannya novisi:

- a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan hutang yang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang-hutang yang lama dan yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang berutang baru di tunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berutang dibebaskan dari perikatannya.
- c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang yang berpiutang baru di tunjuk menggantikan orang berpiutang yang lama, terhadap siapa yang berutang dibebaskan dari perikatannya.

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksud oleh pasal 1425 KUHPerdara adalah suatu keadaan dimana dua orang / pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutangnya tersebut sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus. Dalam kondisi ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang di ambil alih tersebut.

3. Larangan dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

Untuk pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat penerima bank garansi, Bank Indonesia menetapkan ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh bank dalam memberikan bank garansi. Pada Pasal 2

butir 3 Surat Keputusan Bank Indonesia menentukan hal yang tidak boleh dimuat dalam garansi bank sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank.
- b. Ketentuan bahwa garansi bank dapat di ubah atau dibatalkan secara sepihak. Sebagaimana di ketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminiliasi resiko. Berdasarkan prudensial banking bank melakukan penilaian secara seksama terhadap nasabah.
- c. Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau dana yang diterima oleh bank lain.
- d. Bank dilarang memberikan jaminan dalam rupiah untuk bukan penduduk indonesia.
- e. Bank asing dilarang pemberian bank garansi untuk perusahaan diluar jakarta.
- f. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang¹⁰ memberikan bank garansi jangka menengah dan jangka panjang kepada pengusaha non pribumi dalam pengadaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Bank Garansi

1. Pengertian Kontra Garansi

¹⁰ Sri Imaniyati Neni, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama hal 67

Kontra Garansi merupakan jaminan yang diberikan nasabah (yang dijamin) kepada BRI atas BG yang diterbitkan BRI. Pada hakekatnya kontra garansi sama seperti konsep jaminan dalam pemberian fasilitas kredit direct. Dengan demikian makna filosofis kontra garansi tidak hanya terbatas aspek collateral, tetapi keyakinan atas aspek-aspek 5'C debitur lainnya menjadi bagian dari jaminan (kontra garansi).

Semua jenis “kontra garansi” dalam pengertian collateral harus dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, disertai tindakan-tindakan pengamanannya. Apabila terdapat surat kuasa pengikatan kontra garansi, maka dalam surat kuasa pengikatan kontra garansi tersebut harus mencantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kontra garansi diatur sebagai berikut :

1. Kontra Garansi Dari Bank Di Luar Negeri

Untuk menerima kontra garansi dari bank di luar negeri, hal yang harus diperhatikan adalah bonafiditas bank luar negeri tersebut. Besarnya kontra garansi dari bank di luar negeri minimal sama dengan bank garansi yang diterbitkan oleh BRI. Unit kerja yang berwenang untuk melakukan analisis dalam menilai risiko bank luar negeri yang dapat diterima sebagai pemberi kontra garansi, adalah Kantor Pusat BRI Divisi Internasional.

Untuk kontra garansi dari bank di dalam negeri, dapat diterima apabila bank tersebut termasuk kelompok bank dengan rating baik dan telah mendapatkan fasilitas *line* dari Divisi Treasury. Dengan demikian, setiap penerbitan bank garansi dengan kontra garansi dari bank dalam negeri, harus dilakukan dengan mekanisme ijin prinsip melalui Divisi Treasury.

2. Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai

Setoran tunai bank garansi dapat berupa :

a. Setoran Tunai Dalam Rekening Setoran Jaminan

Kontra Garansi dalam bentuk setoran tunai ini tidak diberikan jasa bunga simpanan.

b. Kontra Garansi Dalam Bentuk Rekening Simpanan (Deposito, Tabungan, Giro)

Ketentuan mengenai pengikatan kontra garansi dalam bentuk simpanan mengacu kepada Surat Edaran tentang Kredit Dengan Agunan Kas.

3. Kontra Garansi Lainnya

Kontra garansi lainnya adalah kontra garansi yang diperoleh dari nasabah atau pihak ketiga lainnya dengan nilai yang memadai

¹¹ untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank, dapat berupa :

a. Kontra Garansi Immaterial

¹¹ Matasik, D. P. (2020). Penerbitan Bank Garansi Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Privatum*, 7(5)

Kontra Garansi yang bersifat immaterial adalah kontra garansi yang tidak berwujud, yaitu berupa *corporate guarantee* dari lembaga keuangan lain. Dalam rangka pemberian bank garansi dengan kontra garansi berupa *corporate guarantee*, harus dilakukan setelah melalui penilaian yang cermat terhadap bonafiditas lembaga pemberi *corporate guarantee*. Untuk sementara diatur bahwa lembaga penerbit *corporate guarantee* sebagai kontra garansi ini harus memiliki kerja sama dengan BRI. Kerja sama dengan lembaga keuangan lain sebagaimana tersebut diatas, dilakukan secara *case by case* berdasarkan rekomendasi *credit line* dari Divisi Treasury. Unit kerja yang berwenang melakukan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Kantor Pusat BRI Divisi Administrasi Kredit.

b. Kontra Garansi Material

Kontra garansi material adalah kontra garansi dalam bentuk agunan fisik, antara lain berupa :

b.1. Tanah/Bangunan

b.2. Kendaraan, mesin-mesin

b.3. Lainnya

Dalam pelaksanaan di lapangan, dimungkinkan kontra garansi yang diberikan nasabah terdiri lebih dari satu

macam/jenis. Misalnya kontra garansi sebagian berupa kas dan lainnya berupa kontra garansi material (tanah, bangunan atau aktiva tetap lainnya). Yang perlu diperhatikan adalah aspek pengamanan dan pengikatan masing-masing kontra garansi tersebut, agar tidak menimbulkan kesulitan/kerugian BRI.

5. Penggunaan Kelonggaran Tarik Sebagai Kontra Garansi

Pada prinsipnya tidak dikenal adanya kontra garansi dalam bentuk kelonggaran tarik, baik dilihat secara filosofi maupun prinsip kontra garansi sesuai diatur Bank Indonesia.

Dengan demikian adanya praktek pemblokiran kelonggaran tarik sebagai kontra garansi, harus difahami oleh pejabat kredit sebagai sesuatu yang bersifat sementara. Oleh karena itu apabila telah diperoleh data historis yang cukup dimana debitur selama lebih dari tiga periode (tiga tahun) berturut-turut menggunakan kelonggaran tarik sebagai kontra garansi, harus ditangkap secara filosofi terdapat hal-hal berkaitan dengan bisnis debitur yang harus dikaji kembali.

Pertama; pemrakarsa harus berinisiatif melakukan pengkajian dan mengkomunikasikan dengan debitur perlunya diberikan fasilitas *line* / plafond BG. Karena secara konseptual analisis

perhitungan fasilitas kredit *direct* berkaitan langsung dengan prediksi *future cash flow* debitur, dimana BG merupakan fasilitas *contingent* yang tidak termasuk dalam proyeksi *cash flow* tersebut.

Kedua; pemblokiran kelonggaran tarik sebagai kontra garansi *secara permanen* mencerminkan adanya kebutuhan fasilitas kredit *direct* oleh debitur yang lebih rendah dibandingkan yang disediakan bank, yang dampak langsungnya adalah profitability bank atas account ini menjadi rendah, disamping adanya potensi risiko lainnya.

Dengan demikian sejak dikeluarkannya kebijakan ini, tidak diperkenankan adanya penggunaan fasilitas kelonggaran tarik secara permanen yang diblokir sebagai kontra garansi. Apabila selama tiga periode berturut-turut menunjukkan adanya kebutuhan debitur akan hal ini, maka pilihan yang dapat diambil adalah segera disediakan *line/plafond* BG dan atau diwajibkan bentuk kontra garansi lain (setoran tunai, simpanan, asset lain).

2. Penyelesaian Bank Garansi

- a) Tidak Terdapat Klaim Dari Pihak Yang Menerima Jaminan

Dalam hal BG telah melewati jangka waktu berlakunya klaim, tidak terdapat klaim dari pihak penerima BG, hal yang perlu dilakukan unit kerja pemrakarsa BG dan/atau unit kerja pembuku adalah :

- 1) Menihilkan rekening administratif
 - 2) Menyelesaikan setoran jaminan nasabah yang meminta BG
- b) Terdapat Klaim Dari Pihak Yang Menerima Jaminan

Klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi. Batasan waktu klaim yang dapat dilayani BRI adalah sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya / jatuh tempo BG tersebut.

Apabila setelah batas waktu tersebut pihak yang menerima jaminan tidak mengajukan klaim kepada BRI, maka BRI selaku penjamin tidak berkewajiban memenuhi klaim.

Sebelum membayar klaim, pejabat kredit lini harus meyakini kebenaran klaim tersebut, dengan melakukan hal-hal antara lain :

- 1) Meneliti surat pengajuan klaim (harus diajukan oleh pihak yang menerima BG), beserta dokumen pendukung klaim.
- 2) Meneliti transaksi / kegiatan yang dijamin dengan bank garansi sebagaimana dinyatakan dalam warkat BG, untuk meyakini apakah klaim tersebut memenuhi syarat untuk diajukan.

- 3) Melakukan pengecekan atas wanprestasi yang dilakukan nasabah sebagai *cross-check* atas kebenaran klaim yang diajukan pihak penerima BG.
- 4) Melakukan pembicaraan dengan pihak penerima BG mengenai jumlah klaim yang akan dibayar BRI, apabila ternyata wanprestasi yang dilakukan nasabah hanya sebagian (berdasarkan kesepakatan nasabah dengan pihak penerima BG sesuai dokumen pendukung).

Tata cara penyelesaian klaim dan pencairan kontra garansi dibedakan sebagai berikut : BG yang merupakan komitmen dalam bentuk *contingent liability* bagi bank, akan berubah menjadi pinjaman langsung (*direct*) apabila pada saat terjadi klaim, nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada bank karena ada permasalahan yang disebabkan kontra garansi yang diserahkan kepada bank :

- 1) Tidak dapat dicairkan pada saat bank membayar klaim;
- 2) Dapat dicairkan tapi tidak mengcover jumlah klaim yang dibayar oleh bank.

1. Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai 100%

Apabila kontra garansi dari nasabah berupa setoran tunai 100% (*fully cash collateralized*), terhadap klaim yang diajukan pihak yang menerima jaminan, BRI dapat langsung mencairkan kontra garansi, sehingga BG tersebut tidak menjadi kredit efektif.

Dalam hal BG yang diterbitkan dalam valas, maka sebelum klaim dibayar terlebih dahulu harus ditetapkan kurs konversi valas tersebut. Ketentuan kurs konversi yang digunakan mengacu kepada SE Direksi BRI Nose S. 25-DIR/ADK/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Ketentuan Umum Pemberian Kredit Dalam Valas, yaitu pembayaran dengan Rupiah menggunakan Kurs Beli BRI.

2. Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai Sebagian (< 100 %)

a. Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai Sebagian dan Kelonggaran Tarik Kredit

Apabila terjadi klaim dari pihak yang menerima jaminan, BRI harus membayar dengan segera. Pembayaran tersebut bersumber dari :

- 1) Pencairan kontra garansi yang berupa setoran tunai tersebut, dan
- 2) Pembebanan sisa pembayaran klaim tersebut ke rekening setoran jaminan atau rekening simpanan yang bersumber dari penarikan kelonggaran tarik pinjamannya.

b. Kontra Garansi Berupa Setoran Tunai Sebagian dan Kontra Garansi Aktiva Tetap

Apabila terjadi klaim dari pihak yang menerima jaminan, BRI harus membayar dengan segera. Pembayaran tersebut bersumber dari :

- 1) Pencairan kontra garansi yang berupa setoran tunai tersebut, dan
- 2) Pembebanan sisa pembayaran klaim tersebut ke rekening pinjaman atas nama nasabah ybs, sebesar BG dikurangi dengan nilai kontra garansi yang berupa setoran tunai.

3. Kontra Garansi Berupa Aktiva Tetap

Apabila terjadi klaim dari pihak yang menerima jaminan, BRI harus membayar dengan segera. Pembayaran tersebut dibebankan ke rekening pinjaman atas nama nasabah ybs sebesar nilai klaim bank garansi yang dibayar BRI. Pembebanan ke rekening pinjaman nasabah tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Atas pembayaran BG yang menjadi kredit efektif sebagaimana dikemukakan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas, Kanca BRI segera menyurati debitur yang memuat :

- a. Jumlah kredit
- b. Suku bunga kredit
- c. Provisi kredit
- d. Biaya administrasi dan biaya lainnya yang menjadi beban debitur
- e. Jangka waktu penyelesaian kredit (maksimal 3 bulan)

Surat pemberitahuan kepada debitur tersebut menunjuk Surat Perjanjian Kontra Garansi dan pembayaran klaim yang dilakukan BRI. Surat pemberitahuan dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kontra Garansi ybs. Pemimpin Cabang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembayaran klaim BG sebagaimana dikemukakan pada butir 1 s/d 3 Di Atas.